

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN

BPM BUKU
PENDALAMAN
MATERI



**USBN
UN/UNBK
UN/UNKP
2019**

SMA/MA

PPKn

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL

PPKn

Bab 1 Ideologi dan Konstitusi

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 1

1. Dalam konstitusi, tidak dimuat syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Tetapi, konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut.
 - a. Organisasi negara, seperti lembaga-lembaga negara dengan pembagian kekuasaannya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 - b. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
 - c. Prosedur mengubah konstitusi.
 - d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari konstitusi.

Jawaban: E

2. Di Indonesia, Konstitusi RIS berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950.

Jawaban: B

3. Pada masa revolusi fisik tahun 1945–1949, di Indonesia pernah terjadi penyimpangan terhadap UUD Proklamasi, yaitu dengan dibentuknya kabinet parlementer, padahal dalam UUD Proklamasi dianut sistem pemerintahan kabinet presidensial.

Jawaban: C

4. UUD Proklamasi hanya terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Adapun penjelasan menjadi bagian dari UUD NRI Tahun 1945 setelah ditetapkan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Jawaban: D

5. Potensi negara tidak termasuk ke dalam substansi konstitusi. Konstitusi memuat rumusan dasar negara, perlindungan hak asasi manusia, lembaga-lembaga negara, dan pemerintahan negara.

Jawaban: E

6. Konstitusi dirumuskan untuk menjadi panduan bagi negara dalam menjalankan kehidupannya. Dengan kata lain, konstitusi dibuat untuk mencapai ketertiban negara.

Jawaban: C

7. Undang-Undang Dasar disebut supel apabila hanya memuat hal-hal pokok mengenai penyelenggaraan negara.

Jawaban: A

8. Hubungan antara dasar negara (ideologi) dengan konstitusi ialah bahwa dasar negara (ideologi) menjadi sumber dalam penyusunan konstitusi. Dengan kata

lain, konstitusi bersumber pada nilai-nilai dan spirit yang terkandung dalam dasar negara (ideologi).

Jawaban: B

9. Pasal 33 mengatur tentang perekonomian Indonesia yang berdasar atas asas kekeluargaan dan pengaturan harta kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya. Pasal 34 mengatur tentang perlindungan bagi fakir miskin dan anak terlantar sehingga mereka dapat hidup secara layak di negara Indonesia. Dengan kata lain, kedua pasal tersebut melindungi nilai-nilai keadilan. Sehingga rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi.

Jawaban: E

10. Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang kesamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan Pasal 30 ayat (1) mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Hal ini berarti, kedua pasal tersebut mengandung nilai-nilai kesamaan derajat.

Jawaban: C

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 2

1. Nilai praksis Pancasila adalah nilai-nilai pengamalan Pancasila dalam perilaku hidup sehari-hari. Nilai-nilai ini akan selalu berubah sepanjang zaman karena harus mengikuti kebutuhan hidup manusia.

Jawaban: A

2. Nilai instrumental sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2). Pasal 29 ayat (1) berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 29 ayat (2) berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Jawaban: C

3. Dalam Pasal 33 dan 34 UUD NRI Tahun 1945, diatur mengenai perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan, mengatur harta kekayaan negara dan perlindungan bagi fakir dan miskin. Hal ini merupakan salah satu wujud nilai instrumental sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Jawaban: D

4. Demonstrasi adalah salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Jawaban: D

5. Menyejahterakan rakyat merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk ke dalam nilai praksis sila kelima Pancasila.

Jawaban: E

6. Sikap bijaksana dalam menghadapi globalisasi bagi kita ialah menyiaring setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila sesuai dengan Pancasila, perkembangan tersebut kita terima. Namun, jika bertentangan dengan Pancasila, kita wajib meninggalkannya.

Jawaban: C

7. Makna ideologi terbuka ialah ideologi yang membuka diri dari pengaruh bangsa lain, sepanjang sesuai dengan jati diri bangsa. Pancasila adalah ideologi terbuka. Oleh sebab itu, Pancasila menerima nilai-nilai yang datang dari luar sepanjang sesuai dengan nilai dasar yang lima.

Jawaban: D

8. Penggunaan media sosial untuk mendukung tim PSSI Indonesia yang tengah bertanding merupakan salah satu wujud nilai praksis Pancasila yang sesuai dengan sila "Persatuan Indonesia" (sila ketiga).

Jawaban: B

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini merupakan perwujudan nilai instrumental sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Jawaban: A

10. Perwujudan nilai instrumental sila keempat Pancasila terdapat dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang kebebasan mengemukakan pendapat.

Jawaban: B

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 3

1. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdapat empat pokok pikiran yang merupakan gagasan pokok mengenai penyelenggaraan negara. Keempat pokok pikiran tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

a. **Pokok pikiran pertama**

"Negara" - begitu bunyinya – "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh *tumpah darah* Indonesia dengan berdasar atas *persatuan* dengan mewujudkan *keadilan sosial* bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam Pokok pikiran pertama ini, diterima aliran pengertian negara *persatuan*, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "Pembukaan" itu, menghendaki persatuan, me-

liputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

b. **Pokok pikiran kedua**

Negara hendak mewujudkan *keadilan sosial* bagi seluruh rakyat.

c. **Pokok pikiran ketiga**

Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam "Pembukaan" ialah negara yang *berkedaulatan rakyat*, berdasar atas kerakyatan dan *permusyawaratan perwakilan*. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas *kedaulatan rakyat* dan berdasar atas *permusyawaratan perwakilan*.

d. **Pokok pikiran keempat**

Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam "Pembukaan" ialah negara berdasar atas *Ketuhanan Yang Maha Esa* menurut dasar *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Jawaban: D

2. Pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung kesejalan nilai dengan sila keempat Pancasila.

Jawaban: D

3. Alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ini mengandung motivasi spiritual bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.

Jawaban: A

4. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia selain tercantum dalam teks Proklamasi, juga ditegaskan kembali dalam alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Adapun dasar filosofi negara Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat.

Jawaban: E

5. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai berikut.

a. Kaidah pokok negara yang fundamental.

b. Tertib hukum tertinggi dalam negara.

c. Berkedudukan luhur, kuat, dan tetap.

d. Memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal. Artinya, setiap hal yang ada di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Jawaban: E

6. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan usaha Pemerintah dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jawaban: D

7. Alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentusa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang, dan kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah.

Jawaban: B

8. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak akan diubah, sebab setiap hal yang tercantum dalam Pembukaan terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berarti mengubah bangunan negara yang telah didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jawaban: C

9. Isi alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berkenaan dengan masa depan bangsa ialah memuat tujuan hidup berbangsa dan bernegara, yakni:
- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - memajukan kesejahteraan umum;
 - mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jawaban: C

10. Semangat kemerdekaan dan menciptakan perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea pertama dan keempat merupakan dua semangat pokok yang mendorong bangsa Indonesia mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.

Jawaban: C

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 4

1. Hukum adalah aturan berupa perintah dan larangan yang dibuat oleh aparat yang berwenang dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi yang bersifat tegas dan memaksa.

Jawaban: C

2. Keterkaitan antara berbagai elemen hukum untuk mencapai tujuan hukum dinamakan sistem hukum.

Jawaban: C

3. Salah satu sumber hukum formal adalah kebiasaan atau konvensi. Kebiasaan yang menjadi sumber hukum adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditaati oleh masyarakat dan apabila ada yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran.

Jawaban: E

4. Hubungan antarsubjek hukum yang melintasi batas-batas negara adalah hubungan internasional dan hukum yang mengaturnya dikenal dengan hukum internasional.

Jawaban: C

5. Peradilan militer adalah peradilan untuk mengadili aparat militer atau yang dianggap militer jika ia melakukan pelanggaran hukum.

Jawaban: B

6. Pengadilan konesitas yaitu pengadilan gabungan antara pengadilan militer dengan pengadilan sipil.

Jawaban: C

7. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan untuk mengadili pejabat negara atau aparatur tata usaha negara yang melakukan penyalahgunaan jabatan atau kewenangannya.

Jawaban: C

8. Seorang terdakwa yang divonis hakim lalu tidak puas dengan putusannya, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di tingkat Provinsi.

Jawaban: B

9. Aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan pada tingkat pertama ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Jawaban: A

10. Seorang terdakwa yang divonis hakim lalu tidak puas dengan putusannya, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di tingkat Provinsi.

Jawaban: D

11. Dalam proses hukum, yang bertugas memutuskan perkara ialah hakim, yang menuntut perkara ialah jaksa, serta yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah polisi.

Jawaban: B

12. Salah satu fungsi pengadilan ialah menciptakan keadilan legalitas (hukum).

Jawaban: A

13. Terdakwa adalah seseorang yang tengah disidangkan dalam suatu sidang pengadilan.

Jawaban: C

14. Pengadilan tingkat kasasi adalah pengadilan yang dilaksanakan di Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung sering disebut sebagai pengadilan tingkat kasasi.

Jawaban: A

15. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara.

Jawaban: A

16. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa macam bentuk korupsi, di antaranya sebagai berikut.
 - a. **Korupsi intelektual**, yaitu apabila seseorang dengan sengaja memberikan informasi atau data ilmiah yang salah untuk kepentingan politis atau kariernya.
 - b. **Korupsi etis**, yaitu apabila perbuatan yang salah atau jahat diusahakan agar dianggap sebagai perbuatan yang baik.
 - c. **Korupsi moral**, yaitu apabila kejujuran umum sudah sangat merosot (misalnya, menurunnya kesetiaan).
 - d. **Korupsi waktu kerja**, yaitu apabila santai, mengobrol, atau mengurus kepentingan sendiri pada waktu kerja tanpa alasan yang sah.
 - e. **Korupsi uang**, yaitu perbuatan seorang pejabat, perorangan, atau kelompok yang memiliki kewenangan mengelola keuangan untuk kepentingan umum atau pihak lain yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Jawaban: B

17. Kolusi adalah kerja sama dengan pihak di luar aparat pemerintahan untuk memudahkan dan memuluskan tindakan korupsinya.

Jawaban: B

18. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituangkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002.

Jawaban: C

19. Tugas yang diemban oleh KPK adalah sebagai berikut.
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
 - d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
 - e. Memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.

Jawaban: E

20. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berlandaskan pada asas-asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kepentingan umum;
 - e. proporsionalitas.

Jawaban: E

Bab 2 Sistem Ketatanegaraan

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 1

1. Bangsa terbentuk karena adanya kesamaan bahasa, adat istiadat, tempat tinggal, sejarah, nasib dan cita-cita, rasa kebangsaan (nasionalisme), keturunan, serta ras. Kesamaan pekerjaan tidak termasuk ke dalam faktor pengikat suatu komunitas masyarakat dalam ikatan bangsa.

Jawaban: E

2. Menurut Otto Bauer, negara adalah organisasi yang terbentuk karena kesamaan karakter.

Jawaban: E

3. Menurut Hans Kohn, negara merupakan buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak.

Jawaban: B

4. Menurut Hans Kohn, faktor objektif pembentuk bangsa ialah kesamaan keturunan, bahasa, politik, dan agama. Pekerjaan tidak termasuk ke dalam pembentuk bangsa.

Jawaban: E

5. Menurut Friederich Hertz, hal-hal yang berpengaruh terhadap pembentukan bangsa ialah sebagai berikut.

- a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
- b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
- c. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan.
- d. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

Keinginan untuk menyamakan segala ciri khas dan karakter setiap manusia yang ada di dalamnya tidak termasuk ke dalam hal-hal yang berpengaruh terhadap pembentukan bangsa.

Jawaban: E

6. Unsur pokok yang mengikat bangsa Indonesia secara sejarah ialah adanya kesamaan nasib dan cita-cita, yakni nasib sebagai bangsa yang dijajah dan bercita-cita ingin merdeka.

Jawaban: D

7. Terdapat empat unsur terbentuknya negara. Di antaranya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat tergolong ke dalam unsur

konstitutif, sedangkan pengakuan dari negara lain termasuk ke dalam unsur deklaratif.

Jawaban: D

8. Nasionalisme (perasaan kebangsaan) merupakan unsur pokok yang paling mengikat suatu masyarakat dalam ikatan bangsa.

Jawaban: B

9. Unsur konstitutif negara Indonesia terpenuhi secara sempurna sejak tanggal 18 Agustus 1945, yakni sejak diangkatnya Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Moch. Hatta dalam Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Jawaban: B

10. Negara yang dijajah lalu membebaskan diri dan mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka, merupakan salah satu cara terbentuknya negara melalui proklamasi.

Jawaban: C

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 2

1. Ciri masyarakat madani di antaranya sebagai berikut.
 - a. Mandiri dalam hal pendanaan (tidak bergantung kepada negara).
 - b. Swadaya dalam kegiatannya (memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungan).
 - c. Bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang sosial.
 - d. Tidak terlibat dalam urusan persaingan politik untuk merebut kekuasaan.

Jawaban: E

2. Dalam masyarakat madani, dibutuhkan warga masyarakat yang cerdas, sejahtera, mandiri, dan peduli. Masyarakat madani tidak harus ekslusif.

Jawaban: E

3. Ciri khas masyarakat madani dalam bidang politik ialah tidak terlibat dalam persaingan politik untuk mendapatkan kekuasaan.

Jawaban: B

4. Ciri masyarakat madani yang paling sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang beraneka ragam ialah menghargai pluralisme dalam kehidupannya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Namun, di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia mampu untuk tetap mempertahankan diri sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia.

Jawaban: D

5. Masyarakat madani pada dasarnya adalah masyarakat yang memiliki karakter demokratis dalam kehidupannya.

Jawaban: A

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 3

1. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer di antaranya sebagai berikut.
 - a. Badan legislatif atau perlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
 - b. Anggota parlemen terdiri dari orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilu.
 - c. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet.
 - d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas parlemen.
 - e. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
 - f. Sebagai imbalan atas kekuasaan parlemen yang dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atau raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen.

Jawaban: B

2. Salah satu kelemahan sistem pemerintahan kabinet parlementer ialah pemerintahan tidak stabil dan kabinet bisa jatuh sebelum waktunya berakhir akibat mosi tidak percaya dari parlemen.

Jawaban: C

3. Kabinet parlementer pernah dianut dalam konstitusi negara kita, yakni pada masa Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Jawaban: C

4. Pasal 4 dan 17 UUD NRI Tahun 1945 mengindikasikan bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Adapun pada Pasal 17, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Jawaban: D

5. Inggris adalah negara yang menjadi induk pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer, sedangkan induk sistem pemerintahan presidensial ialah Amerika Serikat.

Jawaban: D

6. Negara yang menjadi induk sistem pemerintahan presidensial ialah USA (United State of America).

Jawaban: A

7. Menurut Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Jawaban: D

8. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri berlakunya sistem pemerintahan parlementer di Indonesia.

Jawaban: C

9. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial ialah bahwa eksekutif dapat dominan dan berkuasa penuh sehingga terdapat peluang untuk bertindak semena-mena.

Jawaban: A

10. Salah satu keunggulan sistem pemerintahan parlementer ialah pemerintahan merepresentasikan aspirasi rakyat.

Jawaban: A

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 4

1. Sistem politik adalah seperangkat tugas dan fungsi struktur politik (infrastruktur dan suprastruktur politik) serta hubungannya satu sama lain dalam kehidupan bernegara.

Jawaban: E

2. Suprastruktur politik adalah perangkat pemerintahan/lembaga negara. Sementara itu, infrastruktur politik adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak memengaruhi sistem politik. DPR adalah salah satu suprastruktur politik pusat di Indonesia.

Jawaban: A

3. Mahkamah Agung adalah suprastruktur politik yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif.

Jawaban: C

4. Indonesia adalah negara yang menganut asas pembagian kekuasaan (*division of power*).

Jawaban: E

5. Kelompok penekan (*pressure group*) yaitu salah satu institusi yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir untuk memengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah.

Jawaban: A

6. Salah satu fungsi parpol adalah melakukan rekrutmen, yaitu mencari bibit-bibit atau calon pemimpin yang berkualitas untuk memimpin negara/pemerintahan.

Jawaban: B

7. Lembaga politik yang menjadi peserta pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat, baik di pusat maupun di daerah ialah partai politik (parpol).

Jawaban: E

8. Keuangan negara di Indonesia diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan salah satu suprastruktur politik di Indonesia.

Jawaban: D

9. Menurut **Gabriel A. Almond**, kelompok kepentingan diidentifikasi ke dalam beberapa kelompok, yaitu seperti berikut ini.

- Kelompok anomik*, yaitu kelompok kepentingan yang terbentuk di antara unsur masyarakat secara spontan.
- Kelompok non-asosiasi*, yaitu kelompok yang jarang terorganisasi secara rapi dan kegiatannya bersifat kadang kala.
- Kelompok institusional*, yaitu kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi politik di samping artikulasi kepentingan.
- Kelompok asosiasi*, yaitu kelompok khusus yang memakai tenaga profesional yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur untuk memutuskan kepentingan dan tuntutan.

Jawaban: A

10. Untuk mencapai tujuannya, partai politik memiliki fungsi seperti berikut ini.

- Sarana komunikasi politik
Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik berusaha menyalurkan beraneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat, serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
- Sarana sosialisasi politik
Artinya, bahwa partai politik berusaha mendidik anggotanya agar memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik di negaranya.
- Rekrutmen politik
Artinya, partai politik merupakan media mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.
- Pengatur konflik
Artinya, partai politik mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Jawaban: A

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 5

1. Bangsa yang dijajah kemudian melawan penjajah dan mendeklarasikan dirinya sebagai suatu negara, maka negara tersebut berdiri melalui proklamasi.

Jawaban: C

2. Negara yang memisahkan diri dari negara induknya lalu mendirikan negara baru, maka negara seperti ini berdiri melalui cara separatis. Setelah dirobohkan Tembok Berlin, Jerman Barat dan Jerman Timur kemudian melebur menjadi satu negara, yaitu Republik.

Jawaban: D

3. Jerman adalah negara yang terbentuk karena adanya peleburan (fusi). Setelah dirobohannya Tembok Berlin, Jerman Barat dan Jerman Timur kemudian melebur menjadi satu negara, yaitu Republik Federal Jerman.

Jawaban: A

4. Menurut teori ketuhanan, negara terbentuk karena adanya kehendak dari Tuhan YME.

Jawaban: A

5. Menurut teori kekuasaan, negara terbentuk karena adanya orang yang berkuasa. Kemudian, orang yang berkuasa itu membentuk negara. Maka, jadilah negara.

Jawaban: C

6. Menurut teori hukum alam, manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin berkumpul dengan orang lain. Untuk mewujudkan kodratnya itu, manusia membuat negara. Inilah bunyi teori terbentuknya negara secara hukum alam.

Jawaban: B

7. Menurut teori perjanjian masyarakat, negara terbentuk melalui perjanjian, baik melalui *pactum unionis* (kesepakatan membentuk negara) maupun *pactum subjectonis* (perjanjian antara rakyat dengan penguasa yang diangkat untuk mengurus negara).

Jawaban: A

8. Negara-negara bekas jajahan Inggris bersatu dalam persekutuan yang dinamakan dominion.

Jawaban: D

9. Protektorat yaitu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Pada hakikatnya, negara yang dilindungi tidak dapat dianggap sebagai negara merdeka.

Jawaban: C

10. Menurut Polybios, bentuk pemerintahan tertua adalah monarki (kerajaan). Dari bentuk monarki, sebuah negara akan terus-menerus berkembang dan berubah menjadi bentuk negara yang lain.

Jawaban: B

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 6

1. Otonomi daerah ialah hak, kewenangan, kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya.

Jawaban: D

2. Asas-asas pemerintahan

- a. **Desentralisasi** adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah, menjadi urusan rumah tangganya. Menurut asas ini, pemerintah daerah memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk

mengurus atau mengatur rumah tangga daerahnnya sendiri.

- b. **Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
- c. **Tugas pembantuan** adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Jawaban: A

3. Urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ialah agama, yustisi, politik luar negeri, fiskal dan moneter, serta pertahanan keamanan. Pendidikan termasuk urusan pemerintah daerah.

Jawaban: E

4. Asas-asas pemerintahan

- a. **Desentralisasi** adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah, menjadi urusan rumah tangganya. Menurut asas ini, pemerintah daerah memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengurus atau mengatur rumah tangga daerahnnya sendiri.
- b. **Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
- c. **Tugas pembantuan** adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Jawaban: A

5. Tujuan otonomi daerah di antaranya sebagai berikut.

- a. Pengembangan kehidupan demokrasi.
b. Perwujudan prinsip keadilan.
c. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
d. Pemberdayaan potensi masyarakat.

Mencari kekuasaan di daerah bukan tujuan otonomi daerah.

Jawaban: A

6. DPR bukan termasuk pemerintah pusat dalam kaitannya dengan otonomi daerah.

Jawaban: E

7. Badan daerah adalah salah satu perangkat pemerintah daerah.

Jawaban: A

8. Kecamatan dan kelurahan adalah perangkat daerah yang hanya ada di tingkat kabupaten/kota.

Jawaban: E

9. Pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Jawaban: D

10. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah merupakan:

- pelaku otonomi daerah;
- pelaksana tugas pemerintah pusat;
- pelaksana asas dekonsentrasi;
- pelaksana asas desentralisasi.

Adapun pemberi otonomi daerah adalah Pemerintah Pusat.

Jawaban: A

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 7

1. Pada masa Orde Baru, terjadi penyimpangan dalam pemerintahan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut, di antaranya sebagai berikut.

- Pembatasan kebebasan pers.
 - Eksekutif lebih dominan dari legislatif.
 - Kebebasan mengemukakan pendapat dibatasi.
 - Kekuasaan kehakiman dalam pengaruh eksekutif.
- Pengangkatan Presiden seumur hidup terjadi pada masa Orde Lama.

Jawaban: A

2. Beberapa kekurangan pelaksanaan pemerintahan pada masa Reformasi, di antaranya sebagai berikut.

- Kekerasan dalam berpendapat.
- Penegakan hukum yang belum tegas.
- Kebebasan pers yang berlebihan.
- Seringnya dilakukan demonstrasi.

Anarkisme jarang terjadi di masa Reformasi.

Jawaban: A

3. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Jawaban: D

4. Adanya lembaga perwakilan rakyat menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan.

Jawaban: B

5. Ciri demokrasi khas Indonesia adalah sebagai berikut.

- Musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.
- Perlindungan hak asasi manusia.
- Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.
- Pemerintahan berdasarkan hukum.

Jawaban: E

6. Demokrasi liberal tahun 1950-an berakhir dengan peristiwa dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Jawaban: C

7. Masa demokrasi terpimpin berlangsung pada tahun 1959–1965. Pada masa ini, terjadi banyak penyimpangan. Beberapa di antaranya yaitu adanya kekuasaan presiden yang tak terbatas dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak komunis. Selain itu, Presiden Sukarno juga melakukan pencabutan terhadap Maklumat Pemerintah November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai dan mengurangi jumlah partai menjadi 10. Pada masa ini tidak diadakan pemilihan umum.

Jawaban: A

8. Di akhir kepemimpinan pemerintah Orde Baru, tindakan Presiden hampir mendekat kepada sikap totaliter (berkuasa penuh).

Jawaban: B

9. Ciri berkembangnya budaya demokrasi di masa Reformasi, di antaranya sebagai berikut.

- Dilaksanakannya pemilu yang luber jurdil.
- Dipilihnya presiden dan wapres dengan voting.
- Pemilihan presiden dan wapres oleh rakyat.
- Dibukanya kebebasan pers dan berpendapat.

Pembubaran paham komunisme bukan termasuk bagian dari berkembangnya demokrasi.

Jawaban: E

10. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang melibatkan rakyat secara langsung pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004.

Jawaban: C

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 8

1. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat regulasi atau perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Sementara itu, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengawasi pelaksanaan perundang-undangan.

Jawaban: A

2. Dalam pembagian kekuasaan, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dibagi-bagi satu sama lain, tetapi ketiganya masih ada hubungan kerja sama. Sementara itu, pemisahan kekuasaan, kekuasaan dibagi-bagi tetapi di antara ketiganya tidak ada hubungan satu sama lain (terpisah secara tegas).

Jawaban: B

3. Undang-Undang yang diusulkan DPR wajib mendapat persetujuan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia dianut pembagian kekuasaan, yaitu masih terdapat kerja sama antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.

Jawaban: C

4. Hasil pengawasan yang dilakukan BPK atas keuangan negara, dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jawaban: D

5. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam memberikan grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Jawaban: E

6. Lembaga negara yang berwenang menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi.

Jawaban: C

7. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

Jawaban: A

8. Mahkamah Konstitusi bertugas menetapkan usul DPR atas dugaan bahwa Presiden/Wakil Presiden melanggar haluan negara untuk dijadikan dasar bagi MPR untuk menetapkan pemakzulan.

Jawaban: D

9. Jika Presiden hendak mengangkat pejabat setingkat menteri, Presiden sebaiknya meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawaban: B

10. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap Undang-Undang.

Jawaban: D

11. Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan perang, serta membuat peradamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan meminta pertimbangan DPR . Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945.

Jawaban: A

12. Berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, MK mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Kesembilan orang hakim konstitusi tersebut, masing-masing diajukan tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Jawaban: B

13. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang menguji kinerja pemerintah dan keuangan negara.

Jawaban: D

14. Lembaga yang berwenang memberhentikan Presiden dari jabatannya jika terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam UUD adalah MPR atas usul DPR dan penetapan tentang kesalahannya oleh MK.

Jawaban: A

15. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.

Jawaban: A

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 9

1. Organisasi pelopor perjuangan bangsa dalam bingkai perjuangan nasional ialah Budi Utomo.

Jawaban: A

2. Bangsa Indonesia lama hidup di bawah penjajahan karena tidak mau bersatu. Setelah bersatu, maka Indonesia dapat mengusir penjajah.

Jawaban: C

3. Faktor eksternal yang mendorong bangsa Indonesia menghadapi penjajah adalah sebagai berikut.
- Kemenangan Jepang melawan Rusia.
 - Berkembangnya paham demokrasi.
 - Berkembangnya paham nasionalisme.
 - Pergerakan nasional negara Asia Afrika.

Jawaban: E

4. Persatuan dan kesatuan lebih sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Jawaban: B

5. Paham nasionalisme mengatakan bahwa kesetiaan tertinggi seorang warga negara harus didedikasikan kepada negara.

Jawaban: C

Bab 3 Hak dan Kewajiban Warga Negara

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 1

1. Warga negara adalah anggota resmi dari suatu organisasi yang disebut dengan negara. Penduduk adalah orang yang berdomisili di suatu wilayah negara.

Jawaban: B

2. Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Jadi, menurut pasal ini, warga negara Indonesia ada dua jenis, yaitu warga negara Indonesia asli dan warga negara Indonesia keturunan asing.

Jawaban: A

3. Anak bangsa asing yang pernah berdomisili di Indonesia lima tahun berturut-turut tidak secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, apalagi jika dilahirkannya di luar wilayah Indonesia.

Jawaban: E

4. Syarat menjadi warga negara Indonesia ialah:
- telah berusia 18 tahun atau telah kawin;
 - pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih;
 - jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadikannya berkewarganegaraan ganda;
 - mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
 - membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Jawaban: E

5. Permohonan untuk mengajukan kewarganegaraan Indonesia ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri.

Jawaban: C

6. Tiongkok menganut asas ius sanguinis, yakni menentukan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, sedangkan Amerika menganut asas ius soli, yakni menentukan kewarganegaraan seseorang menurut tempat ia dilahirkan. Jadi, pada kasus warga negara Tiongkok yang melahirkan anak di Amerika, maka anaknya berstatus *bipatride* (berkewarganegaraan rangkap).

Jawaban: D

7. Seseorang yang berstatus kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau tanpa kewarganegaraan (*apatride*) dapat menyelesaikan kasus kewarganegaraannya

melalui proses naturalisasi (permohonan atau pembatalan kewarganegaraan).

Jawaban: B

8. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2006, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan seseorang. Pengabulan pewarganegaraan tersebut ditetapkan dengan keputusan presiden.

Jawaban: C

9. Sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia:
- memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
 - tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;
 - dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatride*);
 - masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
 - secara sukarela, masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
 - secara sukarela, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 - tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
 - mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
 - bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Republik Indonesia.

Jawaban: D

10. Seseorang yang mengajukan kewarganegaraan Indonesia, baru sah menjadi warga negara setelah mengucapkan sumpah atau janji. Sebab, walaupun sudah ditetapkan oleh Presiden, jika tidak menghadiri

pengucapan sumpah atau janji, maka putusan tersebut batal demi hukum.

Jawaban: E

11. Memiliki penghasilan atau pekerjaan tetap adalah syarat ekonomis untuk menjadi WNI.

Jawaban: E

12. Salah satu sebab seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Republik Indonesia.

Jawaban: B

13. Orang yang berjasa untuk kemajuan bangsa Indonesia dapat diberi kewarganegaraan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Jawaban: E

14. Menurut UU No. 12 Tahun 2006, anak seorang ibu, berkewarganegaraan Indonesia yang dilahirkan di negara lain tetap menjadi warga negara Indonesia meskipun ayahnya berkewarganegaraan asing.

Jawaban: C

15. Surat Izin Mengemudi (SIM) bukan dokumen kependudukan dan kewarganegaraan seseorang.

Jawaban: B

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 2

1. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Menurut pasal ini, setiap warga negara sederajat di depan hukum dan pemerintahan.

Jawaban: A

2. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Ini berarti, bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk membela negara.

Jawaban: A

3. Salah satu wujud kesederajatan di depan hukum adalah siapa pun yang bersalah, ia harus dijatuhi hukuman atau sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Jawaban: C

4. Menurut Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Jawaban: C

5. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Jawaban: C

6. Berikut adalah contoh kesamaan hak warga negara dalam bidang politik.

- Mengemukakan pendapat untuk kemajuan bangsa dan negara.
- Memberikan suara dalam pemilihan umum.
- Menyalurkan aspirasi kepada wakil-wakil rakyat.
- Menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah.

Mendapatkan ketenangan dan ketenteraman hidup, tidak termasuk ke dalam hak warga negara dalam bidang politik, tetapi bidang sosial.

Jawaban: E

7. Mendapatkan pekerjaan, memiliki benda, dan melakukan perjanjian adalah kesamaan hak warga negara dalam bidang ekonomi.

Jawaban: C

8. Tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak menunjukkan persamaan kedudukan dalam kehidupan bermasarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jawaban: E

9. Setiap orang memiliki kesamaan hak dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, tidak seorang pun boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Jawaban: D

10. Menghalang-halangi seorang warga negara untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum termasuk pelanggaran hak warga negara dalam bidang politik.

Jawaban: B

11. Perekutan pegawai pemerintah dengan memprioritaskan anggota keluarga tanpa memperhatikan kompetensi, termasuk pelanggaran hak warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan yang dilindungi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Jawaban: A

12. Yang termasuk kewajiban pelajar dalam membela negara ditunjukkan oleh nomor (2) dan (3) dari pernyataan berikut.

- (1) Mengangkat senjata.
- (2) Melestarikan kebudayaan.
- (3) Belajar dengan tekun.
- (4) Mengolah sumber daya alam.
- (5) Mengembangkan strategi perang.

Jawaban: C

13. Untuk mencapai kerukunan hidup dalam masyarakat yang plural, setiap pemeluk agama wajib mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati antarsesama, baik yang seagama maupun yang berbeda agama.

Jawaban: B

14. Setiap pemeluk agama mempunyai hak yang sama untuk merayakan hari besar agamanya. Oleh karena itu, kita harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk merayakan hari besar agamanya.

Jawaban: B

15. Menurut Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara bebas mengemukakan pikiran, pendapat, dan berekspresi. Tetapi, hal tersebut harus dilakukan dengan mematuhi norma dan undang-undang yang berlaku. Kasus demonstrasi yang disertai dengan cacian dan makian kepada aparat keamanan, termasuk pelanggaran atas pasal ini.

Jawaban: B

16. Menurut Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Hal ini berarti, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memelihara mereka yang fakir dan miskin dalam hidupnya. Salah satunya adalah dengan mencerdaskan kehidupannya dan menyehatkan jiwa dan raganya melalui KIP dan KIS.

Jawaban: E

17. Penetapan UMR merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak warga negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Jawaban: B

18. Kewajiban warga negara Indonesia yang senafas dengan ruh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ialah beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Jawaban: D

19. Kewajiban pelajar yang sesuai dengan semangat Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai pendidikan ialah belajar dengan tekun dan penuh semangat.

Jawaban: B

20. Tindakan anarkis merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam aksi demonstrasi.

Jawaban: E

Bab 4 Hak Asasi Manusia

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 1

1. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia.

Jawaban: B

2. Hak Asasi Manusia bersifat kodrat karena merupakan pemberian Tuhan YME.

Jawaban: C

3. **John Locke** mengartikan hak asasi manusia sebagai hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Menurutnya, karena manusia sebagai makhluk sosial, hak-hak itu akan berhadapan dengan hak orang lain, oleh sebab itu:

- hak asasi harus dikorbankan (dibatasi) untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahirlah kewajiban;
- hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Jawaban: C

4. **Brierly** membagi hak asasi manusia ke dalam 5 macam, yakni:

- hak mempertahankan diri (*self preservation*);
- hak kemerdekaan (*independence*);
- hak persamaan pendapat (*equality*);
- hak untuk dihargai (*respect*);
- hak bergaul satu dengan yang lain (*intercourse*).

Jawaban: E

5. Melarang anak sekolah dan tidak mau menyusui anak tanpa alasan kesehatan termasuk perbuatan melanggar hak asasi anak.

Jawaban: E

6. Hak mengembangkan diri merupakan kebebasan setiap orang. Siapa yang menghalangi hak seseorang untuk mengembangkan diri, maka ia melanggar hak asasi manusia.

Jawaban: E

7. Seorang bayi membutuhkan ASI dari ibunya agar dapat tumbuh dengan sempurna dan sehat. Jika seorang ibu enggan menyusui bayinya bukan karena alasan kesehatan, maka sang ibu telah melanggar hak anak, yakni hak hidupnya.

Jawaban: A

8. Setiap manusia membutuhkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Membayar upah di bawah UMR termasuk perbuatan melanggar hak asasi manusia secara ekonomi.

Jawaban: D

9. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi.

Jawaban: A

10. Memperlakukan manusia secara sama dalam hukum merupakan hak kesederajatan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Jawaban: E

11. Perlindungan terhadap penduduk dan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia dalam bidang agama.

Jawaban: A

12. Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu perwujudan dari hak asasi manusia, yaitu hak *procedural rights* 'prosedural yang sama dalam penuntutan hukum'.

Jawaban: C

13. Kebebasan beragama dan bergerak termasuk ke dalam hak asasi pribadi (*personal rights*).

Jawaban: A

14. Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*), meliputi:
- hak memiliki sesuatu;
 - hak membeli dan menjual;
 - hak memanfaatkan sesuatu, dan sebagainya.

Jawaban: B

15. Penghinaan terhadap orang lain merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk dihargai (*respect*).

Jawaban: D

16. Kebebasan membentuk organisasi sosial dan politik merupakan wujud penghormatan dan pengembangan hak asasi manusia, yakni hak untuk bergaul satu sama lain (*intercourse*).

Jawaban: E

17. Kebebasan memilih jenis pendidikan termasuk ke dalam hak asasi dalam bidang pendidikan.

Jawaban: E

18. Membiarakan rakyat sebebas-bebasnya, tidak termasuk ke dalam perlindungan hak asasi manusia.

Jawaban: D

19. Tidak diberi kesempatan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum termasuk pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak asasi di bidang politik.

Jawaban: C

20. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan HAM menjadi tanggung jawab utama pemerintah/negara.

Jawaban: D

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 2

1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea pertama berbunyi: "Bawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan."

Jawaban: D

2. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menghormati hak asasi manusia dalam beragama dan berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Jawaban: D

3. Pemberlakuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, yakni hak asasi sosial dan budaya. Dengan KIS, diharapkan masyarakat Indonesia secara sosial sehat dari penyakit.

Jawaban: C

4. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Hal ini mengandung arti bahwa warga negara Indonesia dijamin hak asasinya oleh negara dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Jawaban: B

5. Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai pendidikan nasional. Untuk membiayai pendidikan nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jadi, BOS termasuk ke dalam upaya pemerintah dalam melindungi HAM dalam bidang pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.

Jawaban: E

6. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak dan kewajiban bagi warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Jawaban: B

7. Bunyi Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jawaban: D

8. Menurut ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Jawaban: A

9. Pembentukan BPJS Kesehatan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

Jawaban: B

10. Kerja sama ekspor-impor bukan termasuk perlindungan hak asasi manusia dalam bidang keamanan.

Jawaban: E

11. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Hal ini mengandung arti bahwa warga negara Indonesia dijamin hak asasinya oleh negara dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (baik lisan, tulisan, dan sebagainya).

Jawaban: B

12. Makhluk religio magis, artinya adalah makhluk yang memiliki kepercayaan/keyakinan kepada Tuhan YME. Salah satu kodrat ini dibina melalui kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Jawaban: B

13. Hak asasi manusia akan dapat terwujud dengan baik apabila setiap orang mau melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jawaban: C

14. Jika terjadi penyiksaan terhadap demonstran yang tengah menyampaikan pendapatnya, maka terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilindungi dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yakni hak untuk berpendapat.

Jawaban: C

15. Membebaskan seluruh pelajar Indonesia dari biaya sekolah bukan perlindungan terhadap hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

Jawaban: E

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 3

1. Trotoar adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki. Jika digunakan untuk berjualan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), maka hak yang paling banyak dilanggar ialah hak para pejalan kaki.

Jawaban: C

2. Pelanggaran HAM berat merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang diselesaikan di pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dapat berupa pembunuhan, penganiayaan, perbudakan, penyiksaan, kejahatan apartheid, dan sebagainya.

Jawaban: B

3. *Kejahatan genosida*, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

- membunuh anggota kelompok;
- mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya;
- memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Jawaban: A

4. Melarang anak melanjutkan sekolah untuk membantu keluarga termasuk pelanggaran hak asasi anak, yakni hak memperoleh pendidikan.

Jawaban: A

5. Pelanggaran HAM dapat diajukan ke Komnas HAM, sebab lembaga inilah yang dibentuk untuk menegakkan dan memajukan HAM di Indonesia.

Jawaban: B

6. Kejahatan *terhadap kemanusiaan*, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- pembunuhan;
- permusuhan;
- perbudakan;
- pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang

- yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
 - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemanduluan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - i. penghilangan orang secara paksa;
 - j. kejahatan apartheid.

Jawaban: A

7. Kasus seorang istri yang merendahkan suaminya dan seorang suami yang tidak mengizinkan istrinya berkunjung ke sanak saudaranya, maka di sini terjadi pelanggaran hak asasi manusia di dalam keluarga.

Jawaban: B

8. Menekan warga yang protes dan membuang sampah sembarangan termasuk pelanggaran HAM.

Jawaban: D

9. Penumpasan korupsi oleh KPK tidak termasuk pelanggaran HAM.

Jawaban: E

10. Melarang anak melanjutkan sekolah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang pendidikan.

Jawaban: D

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 4

1. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, penanggung jawab utama penegakan HAM di Indonesia ialah negara yang diwakili oleh pemerintah.

Jawaban: B

2. Dalam budaya masyarakat Indonesia, pelanggaran HAM masih dipandang sebagai perbuatan yang memalukan (tabu). Oleh sebab itu, mereka yang dilanggar HAM-nya tidak mau melaporkan ke Komnas HAM karena merasa malu. Inilah salah satu alasan yang menjadi kendala penegakan HAM di Indonesia.

Jawaban: A

3. Pengadilan HAM memiliki ruang lingkup seperti Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, ditempatkan di Pengadilan Negeri di setiap Kabupaten/Kota.

Jawaban: A

4. Tidak ada manusia yang dapat hidup dengan sebebas-bebasnya. Oleh sebab itu, pembatasan

atas kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak dapat diadukan ke Komnas HAM.

Jawaban: E

5. Tidak mau peduli kepada orang lain bukan termasuk ke dalam usaha pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM oleh masyarakat.

Jawaban: C

6. Kurangnya instrumen perlindungan HAM bukan alasan sulitnya penegakan HAM di Indonesia. Sebab, instrumen HAM sudah banyak.

Jawaban: D

7. Tidak mau tahu dengan urusan orang lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.

Jawaban: D

8. Menulis di tembok sekolah termasuk perbuatan melanggar HAM, bukan upaya pemajuan HAM.

Jawaban: D

9. Pembelajaran PPKn termasuk salah satu cara melindungi HAM secara preventif di sekolah sehingga para pelajar terbuka wawasannya mengenai HAM.

Jawaban: A

10. Akibat sulitnya wilayah Indonesia yang luas untuk dijangkau alat serta moda transportasi dan komunikasi ke daerah-daerah terpencil, maka di Indonesia penegakan HAM masih terkendala.

Jawaban: B

11. Membela teman yang salah untuk menjaga persahabatan bukan upaya penegakan HAM.

Jawaban: E

12. Penegakan HAM secara represif, yaitu upaya penindakan terhadap para pelaku pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara berikut.

- a. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus pelanggaran HAM.
- b. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM.
- c. Investigasi dengan pencarian data, informasi, dan fakta terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM dalam masyarakat.
- d. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- e. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui peradilan HAM.

Jawaban: E

13. Komnas HAM dibentuk sebelum terjadinya peristiwa Gerakan Reformasi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Jawaban: B

Bab 5 Hubungan Internasional

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 1

1. Hubungan internasional adalah hubungan yang dilakukan antarsubjek hukum internasional. Individu-individu sebagai pribadi, bukan subjek hukum internasional. Oleh sebab itu, hubungan internasional bukanlah hubungan antara individu dari satu negara dengan negara lain. Kecuali, jika individu tersebut memiliki pengaruh secara internasional.

Jawaban: E

2. Motif utama yang mendorong suatu negara melakukan hubungan internasional ialah motif ekonomi, meskipun motif politik, sosial, pendidikan, pertahanan, dan lainnya juga ada.

Jawaban: A

3. Ekspor impor kendaraan bermotor didorong oleh motif ekonomi.

Jawaban: B

4. Yang bukan menjadi motif Indonesia melakukan hubungan dengan Arab Saudi adalah motif pertahanan dan keamanan. Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi didorong oleh motif keyakinan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan sebagainya.

Jawaban: E

5. Dampak yang akan dirasakan suatu negara yang tidak mau melakukan hubungan internasional adalah sebagai berikut.

- Terkucilkan dalam kehidupan internasional.
- Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Tidak dapat menyejahterakan rakyatnya secara optimal.
- Tertinggal oleh kemajuan zaman yang terus berubah.

Jawaban: E

6. Prinsip-prinsip dalam melakukan hubungan internasional, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Saling menghormati antara satu negara dengan negara lain.
- Menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara lain.
- Tidak mencampuri urusan negara lain.
- Tidak memaksakan kehendak kepada negara lain.

Jawaban: D

7. Manfaat hubungan internasional bagi suatu bangsa, di antaranya sebagai berikut.
- Menumbuhkan saling pengertian antarbangsa/negara.
 - Mempererat hubungan, rasa persahabatan, dan rasa persaudaraan antarbangsa.
 - Saling memenuhi kebutuhan.
 - Memenuhi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
 - Membina dan menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Jawaban: E

8. Permasalahan ekonomi biasanya berhubungan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kegiatan ekonomi berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, biasanya kegiatan ekonomi dikaitkan dengan kegiatan ekspor dan impor.

Jawaban: D

9. Berikut ini wujud hubungan internasional dengan negara lain.

- Perjanjian internasional.
- Penempatan perwakilan konsuler.
- Kerja sama internasional.
- Menjadi anggota organisasi internasional.

Memerangi negara lain tidak termasuk ke dalam wujud hubungan internasional dengan negara lain.

Jawaban: D

10. Menurut ketentuan Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945 untuk mewujudkan hubungan internasional, Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain.

Jawaban: A

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 2

1. Perjanjian antarindividu bukanlah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan antarsubjek hukum internasional yang menghasilkan akibat-akibat hukum.

Jawaban: E

2. Istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut perjanjian internasional, di antaranya seperti berikut ini.

- a. Kovenan (*covenant*), dipergunakan untuk memberi nama perjanjian internasional yang membentuk dan mengatur Liga Bangsa-Bangsa (LBB).
- b. Piagam (*charter*), dipergunakan untuk menyebut perjanjian internasional yang membentuk dan mengatur organisasi internasional.

- c. Konvensi (*convention*), dipergunakan untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal yang dipandang penting, tetapi tidak berkaitan dengan politik tinggi.
- d. Protokol (*protocol*), dipergunakan untuk menyebut suatu dokumen pelengkap instrumen perjanjian internasional yang mencatat pemenuhan para pihak terhadap syarat-syarat perjanjian internasional atau yang memperluas ruang lingkup dan interpretasi perjanjian internasional.
- e. Deklarasi (*declaration*), dipergunakan untuk menyebut perjanjian internasional yang sebenarnya atau suatu revolusi yang dibuat oleh konferensi diplomatik yang berisi prinsip-prinsip dan harus ditaati oleh semua negara.

Jawaban: A

- 3. Tahapan perjanjian internasional ialah perundingan, penandatanganan, dan pengesahan (ratifikasi).

Jawaban: D

- 4. Perjanjian internasional mengikat warga suatu negara apabila telah diratifikasi/disahkan oleh negara tersebut.

Jawaban: D

- 5. Untuk dapat mengikuti suatu perjanjian sebagai wakil/dari negaranya, maka seorang utusan harus memiliki Surat Kuasa Penuh.

Jawaban: A

- 6. Dilihat dari daya mengikatnya, suatu perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi *law making treaty* dan *treaty contract*. *Law making treaty* adalah perjanjian yang membentuk hukum. Perjanjian ini tidak hanya mengikat bagi yang mengadakan perjanjian, tetapi bagi semua bangsa di dunia. Sementara itu, *treaty contract* adalah perjanjian yang hanya mengikat bagi pihak-pihak yang berjanji.

Jawaban: E

- 7. Perjanjian internasional berakhir apabila memenuhi syarat berikut.

- Telah berakhir masanya berlakunya.
- Pihak-pihak yang berjanji sepakat mengakhiri perjanjian.
- Tujuan perjanjian telah tercapai.
- Perjanjian tidak bisa mencapai tujuannya.

Perjanjian internasional tidak bisa diakhiri oleh satu pihak saja.

Jawaban: D

- 8. Dilihat dari pihak-pihak yang berjanji, perjanjian internasional dibedakan ke dalam dua kelompok besar, yaitu perjanjian bilateral (antara dua negara) dan perjanjian multilateral (lebih dari dua negara).

Jawaban: A

- 9. ASEAN termasuk organisasi regional Asia Tenggara.

Jawaban: C

- 10. Ratifikasi merupakan salah satu syarat berlakunya suatu perjanjian. Di Indonesia, lembaga yang memiliki hak untuk itu adalah Presiden dengan persetujuan DPR.

Jawaban: E

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 3

- 1. Perwakilan suatu negara di negara lain disebut perwakilan diplomatik. Di wilayah di mana perwakilan diplomatik ditempatkan, berlaku ketentuan wilayah ekstrateritorial.

Jawaban: E

- 2. Perwakilan diplomatik suatu negara ditempatkan di ibu kota negara. Di Indonesia, perwakilan diplomatik negara lain ditempatkan di Jakarta. Adapun perwakilan konsuler tidak harus di ibu kota negara.

Jawaban: A

- 3. Perwakilan diplomatik mengurus masalah politik negara. Sementara itu, perwakilan konsuler mengurus hal-hal di luar politik.

Jawaban: D

- 4. Salah satu fungsi perwakilan diplomatik suatu negara ialah representasi, yakni menjadi wakil negaranya di negara penerima.

Jawaban: A

- 5. Tingkatan perwakilan diplomatik terdiri atas duta besar, duta, kuasa usaha, dan atase-atase.

Jawaban: B

- 6. Salah satu fungsi perwakilan diplomatik ialah mewakili negaranya di negara penerima. Fungsi ini disebut fungsi representasi.

Jawaban: D

- 7. Salah satu fungsi perwakilan diplomatik yang erat kaitannya dengan persoalan politik negara penerima ialah fungsi representasi. Secara faktual dan legalitas formal, perwakilan diplomatik mewakili negaranya secara politis.

Jawaban: D

- 8. Perwakilan diplomatik ditempatkan di ibu kota negara, sedangkan perwakilan konsuler tidak harus di ibu kota negara.

Jawaban: D

- 9. Diberikannya hak ekstrateritorial di wilayah kedutaan besar suatu negara, dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan negara pengirim, sehingga negara tetap berdaulat di wilayahnya. Di wilayah kedutaan besar suatu negara berlaku hukum negara pengirim.

Jawaban: B

10. Kedutaan besar memiliki kewenangan untuk melakukan observasi di negara tempat ditugaskan. Hasil pengamatannya itu, dilaporkan kepada negara pengirim. Hal ini merupakan fungsi observasi kedutaan besar/perwakilan diplomatik.

Jawaban: A

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 4

1. MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) adalah organisasi internasional yang dibentuk di wilayah Eropa dengan fokus kegiatan pada masalah ekonomi.

Jawaban: B

2. Organisasi internasional yang terbatas pada wilayah tertentu dan tidak meliputi seluruh wilayah dunia disebut organisasi regional. Misalnya, ASEAN, MEE, Pan Arabia, dan sebagainya.

Jawaban: C

3. Tujuan ASEAN tercantum dalam Deklarasi Bangkok.

Jawaban: A

4. Tujuan utama PBB sesuai dengan Piagam San Francisco adalah menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Jawaban: B

5. Salah satu fungsi ASEAN bagi Indonesia ialah memelihara stabilitas nasional. Dengan ASEAN, Indonesia lebih stabil karena berada dalam lingkungan yang damai.

Jawaban: A

6. Hak veto adalah hak untuk membatalkan suatu keputusan yang telah ditetapkan bersama. Negara-negara yang memiliki hak veto ialah Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan RRT.

Jawaban: D

7. Peran PBB dalam menyelesaikan masalah Irian Barat di Indonesia, tergabung dalam wadah UNTEA.

Jawaban: A

8. OPEC adalah singkatan dari Organization of Petroleum Exporting Countries, yaitu suatu organisasi negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini bergerak dalam bidang ekonomi.

Jawaban: B

9. OKI (Organisasi Konferensi Islam) adalah salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang keyakinan agama Islam.

Jawaban: E

10. Pakta Warsawa adalah organisasi pertahanan keamanan di wilayah Asia Timur.

Jawaban: A

11. Peran Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian PBB di Timur Tengah ialah melalui pengiriman Pasukan Garuda untuk perdamaian di Timur Tengah.

Jawaban: A

12. Peran Indonesia dalam misi perdamaian di Indochina (Perang Vietnam) ialah memelopori Jakarta Informal Meeting (JIM).

Jawaban: C

13. Mendirikan organisasi non blok merupakan salah satu peran Indonesia dalam meredakan ketegangan antara Blok Barat dengan Blok Timur setelah Perang Dunia II.

Jawaban: B

14. Peran Indonesia bagi ASEAN yang paling mendasar ialah memelopori berdirinya ASEAN.

Jawaban: A

15. Indonesia penting perannya bagi OKI, sebab Indonesia adalah negara dengan penganut agama Islam yang cukup besar.

Jawaban: A

Bab 6 Persatuan dan Kesatuan

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 1

1. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos/kratein* (berkuasa/kekuasaan).

Jawaban: A

2. Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16 mengemukakan, "*Democracy is government from the people, by the people, and for the people*" 'Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'.

Jawaban: D

3. Asas supremasi hukum menghendaki adanya penegakan hukum secara tegas. Semua pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapa pun, akan diproses secara hukum. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum (*rechmatigheid*).

Jawaban: B

4. **Alamudi** menyebutkan bahwa negara demokrasi harus didirikan di atas soko guru demokrasi berikut ini.

- Kedaulatan rakyat.
- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
- Kekuasaan mayoritas.
- Hak-hak minoritas.
- Jaminan hak asasi manusia.
- Pemilihan yang bebas dan jujur.
- Persamaan di depan hukum.
- Proses hukum yang wajar.
- Pembatasan pemerintah secara konstitusional.

- Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
- Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Jawaban: E

5. Pemisahan kekuasaan bukan ciri khas demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, dianut sistem pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi-bagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di antara ketiga kekuasaan tersebut masih ada hubungan saling memengaruhi satu sama lain.

Jawaban: D

6. Demokrasi langsung tidak mungkin lagi dijalankan di Indonesia karena:
- luasnya wilayah Indonesia;
 - kompleksnya permasalahan;
 - besarnya jumlah penduduk;
 - banyaknya persoalan negara.

Jawaban: D

7. Dasar hukum ideologis merupakan dasar yang diambil dari ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, dasar hukum ideologis setiap hal yang terdapat dan berlaku di Indonesia adalah Pancasila.

Jawaban: A

8. Dalam demokrasi Pancasila, kita perlu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan sila-sila Pancasila dan kultur bangsa Indonesia yang suka bergotong royong dan kekeluargaan.

Jawaban: B

9. Kekuasaan kepala negara yang tidak terbatas, bukan ciri negara hukum yang demokratis, tetapi ciri negara monarki atau kerajaan.

Jawaban: E

10. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut pemerintahan demokrasi terpimpin.

Jawaban: D

11. Pengangkatan Presiden seumur hidup adalah penyimpangan terhadap sendi-sendi demokrasi pada masa Orde Lama.

Jawaban: A

12. Tindakan anarkistik bukan merupakan ciri pelaksanaan demokrasi di masa Reformasi.

Jawaban: A

13. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 2004, dan muncul sebagai pemenangnya ialah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla.

Jawaban: E

14. Prinsip supremasi hukum menempatkan hukum pada kedudukan yang paling tinggi. Segala aktivitas pemerintahan harus berdasarkan legalitas formal yang jelas.

Jawaban: C

15. Demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Oleh sebab itu, di dalam negara demokrasi, Pemerintah menjalankan pemerintahannya atas nama rakyat dan berdasarkan kehendak rakyat.

Jawaban: B

16. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Jawaban: D

17. Bukti nyata bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) ialah adanya lembaga perwakilan rakyat (DPD, DPR, dan MPR).

Jawaban: B

18. **Ahmad Sanusi** mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang digali dari filsafat bangsa, Pancasila, dan Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni demokrasi yang berdasarkan:

- Ketuhanan Yang Maha esa;
- hak asasi manusia;
- kedaulatan rakyat;
- kecerdasan rakyat;
- pemisahan kekuasaan negara;
- otonomi daerah;
- supremasi hukum (*rule of law*);
- peradilan yang bebas;
- kesejahteraan rakyat;
- keadilan sosial.

Jawaban: D

19. Adanya presiden dan menteri-menteri bukan ciri negara demokrasi. Mungkin di negara demokrasi ada presiden dan menteri, tetapi itu bukan persyaratan negara demokrasi.

Jawaban: E

20. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif bukan ciri khas demokrasi Indonesia.

Jawaban: E

21. Gejolak politik pada masa Demokrasi Liberal 1950 – 1959 diakhiri dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya:

- Pembubaran Badan Konstituante;
- Pernyataan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950;
- Pembentukan MPRS dan DPAS.

Jawaban: C

22. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup merupakan bentuk penyimpangan demokrasi pada masa Orde Lama.

Jawaban: A

23. Pada akhir masa demokrasi Orde Baru, kepemimpinan Presiden Soeharto mengarah kepada kepemimpinan totaliter. Sebab, segala kekuasaan terpusat di tangan Presiden.

Jawaban: B

24. Penghapusan paham komunisme bukan ciri budaya demokrasi.

Jawaban: E

25. Ciri intelektual seorang yang demokratis tidak harus memahami teori-teori demokrasi.

Jawaban: E

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 2

1. Anti terhadap kritik menunjukkan individu yang tertutup. Individu yang terbuka tidak anti terhadap kritik.

Jawaban: B

2. Memperlancar urusan jika mendapatkan gratifikasi, bukan ciri jiwa terbuka bagi penyelenggaran negara, tetapi perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Jawaban: E

3. Menurut Aristoteles, macam-macam keadilan terdiri atas keadilan distributif, komutatif, kodrat alam, dan konvensional. Adapun keadilan legalitas adalah keadilan menurut Notonegoro.

Jawaban: D

4. Menurut Notonegoro, suatu perbuatan yang diatur dalam hukum adalah perbuatan yang adil. Suatu hal dikatakan adil jika sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Keadilan ini dinamakan keadilan legalitas.

Jawaban: A

5. Jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Jawaban: B

6. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf d PP No. 101 Tahun 2000, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Jawaban: E

7. Salah satu prinsip kepemerintahan yang baik adalah prinsip partisipasi. Artinya, rakyat terlibat dalam pemerintahan.

Jawaban: C

8. *Equity* adalah prinsip kesamaan/keseimbangan, baik laki-laki maupun perempuan.

Jawaban: A

9. Prinsip kepastian hukum artinya dalam melayani rakyat. Pemerintah harus mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban: A

10. Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pihak terkait.

Jawaban: A

11. Pembatasan partisipasi warga negara dalam pemerintahan bisa menyebabkan sikap pasif dari warga negara karena merasa tidak diakui.

Jawaban: C

12. Pemerintahan yang tidak akuntabel dapat melahirkan hal-hal berikut.

- Pengambilan keputusan didominasi pemerintah.
- Swasta dan masyarakat memiliki peran yang kecil terhadap pemerintah.
- Pemerintah memonopoli berbagai alat produksi yang strategis.
- Masyarakat/pers tidak diberi kesempatan menilai jalannya pemerintahan.

Jawaban: E

13. Jika pemerintah tidak efektif dan efisien, maka kegiatan pemerintahan akan menimbulkan banyaknya seremonial.

Jawaban: A

14. Memperoleh pekerjaan yang layak bukan manfaat keterbukaan.

Jawaban: E

15. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Jawaban: B

16. Kebebasan mutlak tidak akan mengurangi tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jawaban: E

17. Keterbukaan diperlancar oleh perkembangan teknologi komunikasi.

Jawaban: B

18. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Se-gala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Jawaban: A

19. Aktor kepemerintahan yang baik ada tiga, yaitu masyarakat madani, pemerintah, dan sektor swasta.

Jawaban: A

20. Prinsip *rule of law* menyatakan bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu dan harus berkeadilan.

Jawaban: B

21. Karakteristik atau prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP tahun 1997 adalah seperti berikut.

- 1) *Participation* (partisipasi), yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) *Rule of law* (aturan hukum), yaitu hukum harus adil tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.
- 3) *Transparency* (transparan), yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
- 4) *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- 5) *Consensus oriented* (berorientasi pada konsensus), yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
- 6) *Equity* (berkeadilan), yaitu memberikan kesempatan yang sama, baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.
- 7) *Effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efisiensi), yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- 8) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu para pengambil keputusan (pemerintah, swasta, dan masyarakat madani) harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
- 9) *Strategic vision* (bervisi strategi), yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam

nyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

- 10) *Interrelated* (saling keterkaitan), yaitu adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri.

Jawaban: A

22. Karakteristik atau prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP tahun 1997 adalah seperti berikut.

- 1) *Participation* (partisipasi), yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) *Rule of law* (aturan hukum), yaitu hukum harus adil tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.
- 3) *Transparency* (transparan), yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
- 4) *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- 5) *Consensus oriented* (berorientasi pada konsensus), yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
- 6) *Equity* (berkeadilan), yaitu memberikan kesempatan yang sama, baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.
- 7) *Effectiveness and Efficiency* (efektivitas dan efisiensi), yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- 8) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu para pengambil keputusan (pemerintah, swasta, dan masyarakat madani) harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
- 9) *Strategic Vision* (bervisi strategi), yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

- 10) *Interrelated* (kesalingterkaitan), yaitu adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri.

Jawaban: C

23. Jika dilakukan pembatasan partisipasi warga negara dalam pemerintahan, maka pers bisa menjadi pasif.

Jawaban: A

24. Pemerintah cenderung otoriter karena menutup jalan bagi dilaksanakannya konsensus dan musyawarah.

Jawaban: C

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 3

1. Tari Saman, Ulos, dan Tari Piring adalah kebudayaan khas dari Sumatra.

Jawaban: D

2. Suku-suku bangsa Ambon, Dani, Bugis, Alor berasal dari wilayah timur Indonesia.

Jawaban: C

3. Makanan seperti soto rawon, gudeg, tiwul, sega pecel berasal dari Jawa.

Jawaban: B

4. Integrasi nasional adalah usaha dan proses dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

Jawaban: D

5. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing selama bertahun-tahun. Karena hal tersebut, bangsa indonesia bersatu agar dapat terbebas dari penjajahan dan menjadi suatu bangsa yang merdeka. Dalam hal ini perasaan senasib dan secita-cita merupakan salah faktor pendorong integrasi nasional secara sejarah.

Jawaban: E

6. Faktor pembentuk integrasi nasional secara politis ialah adanya ideologi negara yang sama.

Jawaban: C

7. Masyarakat yang heterogen merupakan salah satu penghambat integrasi nasional secara demografi (kependudukan).

Jawaban: B

8. Faktor pembentuk kerukunan hidup beragama ialah bersikap toleran dan menjauhkan diri dari fanatisme sempit.

Jawaban: A

9. Salah satu pendorong integrasi nasional dari sudut budaya luhur bangsa ialah mengembangkan sikap toleran.

Jawaban: C

10. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila ke empat adalah musyawarah mufakat. Dalam musyawarah, kita harus selalu menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan memaksakan kehendak kita kepada orang lain.

Jawaban: B

11. Meningkatkan pengawasan terhadap masuknya ideologi yang merusak bangsa kita merupakan salah satu faktor pembentuk integrasi nasional yang berkenaan dengan upaya perlindungan dasar negara.

Jawaban: E

12. Invasi adalah salah satu bentuk ancaman militer berupa serangan kekuatan bersenjata negara lain ke negara kita.

Jawaban: E

13. Contoh hambatan integrasi di bidang sosial ekonomi adalah kemiskinan.

Jawaban: D

14. Gangguan integrasi nasional dalam bidang sosial budaya misalnya sikap ekstremisme dan ekslusivisme.

Jawaban: C

15. Mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama dan sesama umat seagama merupakan salah satu cara menjaga persatuan dan kesatuan yang sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jawaban: B

16. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan salah satu cara menjaga NKRI. Hal tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia.

Jawaban: A

17. Cara menjaga NKRI yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, di antaranya ialah melaksanakan pembangunan secara berkeadilan untuk seluruh rakyat.

Jawaban: D

18. Spionase ialah kegiatan intelejen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa rahasia negara.

Jawaban: D

19. Ancaman berupa sabotase merupakan ancaman yang dilakukan dengan cara merusak instalasi penting militer atau objek vital nasional.

Jawaban: A

20. Contoh ancaman ideologis terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus diwaspadai di antaranya ialah bangkitnya kembali paham komunisme di Indonesia.

Jawaban: C

21. Makar adalah adanya upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Jawaban: D

22. Salah satu bentuk ancaman bidang politik yang dapat mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia ialah praktik demokrasi yang kebablasan.

Jawaban: C

23. Salah satu ancaman integrasi bangsa dalam bidang ekonomi yang erat kaitannya dengan ideologi, dan perlu mendapat perhatian serta penanganan pemerintah dan rakyat Indonesia seluruhnya ialah munculnya sistem ekonomi kapitalis.

Jawaban: D

24. Salah satu bentuk ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial budaya ialah upaya pembodohan generasi muda melalui berbagai jalur. Salah satu jalur yang paling kuat merusak generasi muda, baik dari sisi fisik maupun moral ialah melalui penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan psikotropika.

Jawaban: B

25. Ancaman integrasi bangsa dalam bidang ideologi yang dilakukan oleh kelompok pengikut agama ialah penghayatan keagamaan yang ekstrem dalam kehidupan.

Jawaban: B

26. Belajar PPKn merupakan salah satu cara paling ampuh di bidang ideologi dalam menghadapi ancaman integrasi nasional bagi pelajar di sekolah.

Jawaban: A

27. Cara menjaga integrasi nasional dalam bidang politik antara lain dapat dilakukan melalui aktivitas turut serta (berpartisipasi) dalam program pemerintah.

Jawaban: E

28. Faktor pendorong integrasi nasional dalam bidang budaya, di antaranya:

- mengembangkan seni budaya bangsa;
- mencintai budaya bangsa sendiri;
- menjauhi sikap hidup hedonis dan materialistik.

Jawaban: B

29. Peran serta masyarakat dalam membangun integrasi nasional di bidang politik dapat ditunjukkan dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Jawaban: B

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 4

1. Kesamaan pekerjaan bukan faktor pembentuk komunitas bangsa.

Jawaban: E

2. Unsur pokok yang mengikat bangsa Indonesia dalam kesatuan secara sejarah ialah karena adanya nasib yang sama, yakni dijajah oleh bangsa asing, serta cita-cita yang sama, yakni ingin merdeka.

Jawaban: D

3. Unsur deklaratif berdirinya negara ialah pengakuan dari negara lain. Sementara itu, unsur konstitutif berdirinya negara ialah adanya wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat.

Jawaban: D

4. Unsur pengikat paling kuat bagi kelompok manusia dalam ikatan bangsa adalah rasa kebangsaan (nasionalisme).

Jawaban: B

5. Unsur konstitutif negara RI terpenuhi secara lengkap pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI.

Jawaban: B

6. Dalam sejarah, Boedi Oetomo merupakan tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk hidup berbangsa dan bernegara.

Jawaban: A

7. Penyebab utama bangsa Indonesia berada cukup lama dalam penjajahan ialah karena kurang kuatnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan rakyatnya.

Jawaban: C

8. Faktor-faktor dari luar yang mendorong kesadaran nasionalisme adalah sebagai berikut.

- Munculnya fase kesadaran akan pentingnya semangat nasional dan perasaan senasib.
- Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan para terpelajar mengenai penentuan nasib sendiri.
- Munculnya dorongan untuk melawan imperialisme Barat karena adanya konflik ideologi antara kapitalisme/imperialisme dan sosialisme/komunisme.
- Lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika memberi inspirasi kaum terpelajar di Indonesia bahwa imperialisme harus dilawan melalui organisasi modern.
- Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1904-1905, telah menyadarkan bangsa Asia, khususnya Indonesia, akan kekuatan dan kemampuannya sebagai bangsa Asia yang telah mampu mengalahkan bangsa Eropa yang selalu menganggap bangsa yang super.

Jawaban: E

9. Dari sejarah, bangsa Indonesia menyadari bahwa Majapahit dan Sriwijaya menjadi negara besar saat persatuan dan kesatuan ditegakkan.

Jawaban: E

10. Nasionalisme adalah paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi pada negara.

Jawaban: C

Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal 5

1. Pers adalah lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha mencari, mengolah, mempublikasikan, dan mengarsipkan informasi.

Jawaban: B

2. Dipertunjukannya berita dan tontonan yang menghibur dalam media massa, menunjukkan bahwa pers memiliki fungsi informasi dan hiburan.

Jawaban: C

3. Kebebasan pers lebih terasa setelah masa Reformasi.

Jawaban: E

4. Peran pers dalam masyarakat demokratis yang erat kaitannya dengan perwujudan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 ialah sebagai media penyampaian pikiran dan pendapat.

Jawaban: C

5. Kode etik yang harus diperhatikan wartawan (jurnalis) Indonesia adalah sebagai berikut.

- Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan serta keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan, serta kritik dan komentar.
- Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
- Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
- Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
- Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.
- Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, *off the record*, dan embargo.
- Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
- Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejadian seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
- Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental, atau latar belakang sosial lainnya.

- Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
- Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, serta kekerasan fisik dan seksual.
- Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
- Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.

Jawaban: D

6. Sesuai dengan pasal 7 kode etik jurnalistik, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaanya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan. Maksud dari *off the record* adalah informasi dari narasumber yang tidak boleh disampaikan, disiarkan, atau diberitakan oleh jurnalis. Seorang jurnalis harus menaati ketentuan ini. Data-data atau informasi yang bersifat rahasia termasuk ke dalam *off the record*.

Jawaban: B

7. Menjatuhkan kekuasaan bukan manfaat dari pers.

Jawaban: E

8. Alat untuk mempublikasikan informasi kepada masyarakat luas disebut media massa (koran, majalah, internet, TV, radio).

Jawaban: D

9. Salah satu fungsi pers adalah edukasi. Fungsi edukasi pers adalah mendidik masyarakat agar memiliki ilmu pengetahuan.

Jawaban: B

10. Apabila di dalam surat kabar dimuat berita-berita tentang para pelaku korupsi agar yang lain tidak melakukan tindakan korupsi, hal ini menunjukkan bahwa pers menjalankan fungsi kontrol sosial.

Jawaban: E

11. Awalnya, pers hanya menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi informasi.

Jawaban: A

12. Pemberedelan pers banyak terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru (Soeharto).

Jawaban: C

13. Pers sangat penting dalam kehidupan demokrasi sebagai media:

- komunikasi bagi rakyat;
- menyampaikan kritik dan saran;
- menyampaikan aspirasi;
- melakukan pendidikan politik.

Jawaban: A

14. Pers di awal kemerdekaan banyak berperan sebagai alat:
- perjuangan mempertahankan kemerdekaan;
 - mengobarkan semangat perjuangan;
 - kepentingan partai politik;
 - menyebarkan berita kemerdekaan.

Jawaban: E

15. Orang yang bersalah tidak boleh dihakimi sebelum ditetapkan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

Jawaban: B

16. Kode etik yang harus diperhatikan wartawan (jurnalis) Indonesia adalah sebagai berikut.

- Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan serta keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan, serta kritik dan komentar.
- Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
- Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
- Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
- Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.
- Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, *off the record*, dan embargo.
- Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
- Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.

- Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental, atau latar belakang sosial lainnya.
- Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
- Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, serta kekerasan fisik dan seksual.
- Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
- Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.

Jawaban: E

17. Penyelewengan terhadap kode etik jurnalistik tidak mungkin membuat rakyat cerdas dalam menerima informasi.

Jawaban: D

18. Penerbitan UU Pers dan Jurnalistik merupakan salah satu bentuk pengendalian dan pembinaan pers secara normatif.

Jawaban: A

19. Pers tidak boleh dijadikan sebagai media indoktrinasi bagi kepentingan aparat pemerintahan.

Jawaban: E

20. Jurnalis atau wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengolah, dan memublikasikan informasi kepada khayak ramai.

Jawaban: E

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN SOAL PEMAHAMAN KURIKULUM 2013 (PAKET 1)

A. Pilihan Ganda

1. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas:
 - Pokok pikiran persatuan (sesuai dengan sila ketiga Pancasila).
 - Pokok pikiran keadilan (sesuai dengan sila kelima Pancasila).
 - Pokok pikiran kerakyatan (sesuai dengan sila keempat Pancasila).
 - Pokok pikiran Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila).

Jawaban: B

2. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ialah keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Hal ini tergambar dalam pernyataan "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Jawaban: C

3. Pokok pikiran pertama pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan". Hal ini berarti negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, serta mengatasi segala paham perseorangan. Pokok pikiran pertama pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini merupakan perwujudan dari sila ketiga pancasila.

Jawaban: A

4. Sebagai sumber nilai, Pancasila menjadi rujukan dan pedoman hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila menjadi moralitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Jawaban: E

5. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan merupakan salah satu wujud pengamalan Pancasila sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Jawaban: B

6. Sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil mu-

syawarah merupakan pencerminkan nilai Pancasila, yaitu sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Jawaban: D

7. Salah satu fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung ialah memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden ketika Presiden hendak menggunakan hak prerogatifnya, yakni memberikan grasi dan rehabilitasi kepada terdakwa.

Jawaban: A

8. Pendapat hakim yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara termasuk ke dalam salah satu sumber hukum formal, yaitu doktrin.

Jawaban: A

9. Ciri-ciri yang ditunjukkan dalam soal adalah ciri-ciri Undang-Undang.

Jawaban: B

10. UU tentang HAM yang berlaku di Indonesia saat ini ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jawaban: E

11. Seorang pelaku tindak pidana, termasuk korupsi, ia harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya.

Jawaban: A

12. Penghormatan dan perlindungan HAM dimaksudkan untuk menghormati hak-hak individu setiap manusia dalam masyarakat, tanpa kecuali.

Jawaban: D

13. Salah satu manfaat terbentuknya ASEAN dalam bidang ekonomi ialah memungkinkan terjadinya hubungan ekonomi antarnegara ASEAN. Bagi Indonesia sendiri, hal ini dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Jawaban: A

14. Manfaat hubungan internasional bagi bangsa Indonesia ialah untuk mewujudkan kepentingan nasional dan politik luar negeri.

Jawaban: C

15. Salah satu hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah dihasilkannya kesepakatan negara-negara Asia dan Afrika dalam Dasasila Bandung.

Jawaban: A

16. Pentingnya kerja sama internasional bagi setiap negara ialah agar terjaminnya kesejahteraan para warga negaranya masing-masing.

Jawaban: E

17. Pedagang kaki lima yang menjual barang dagangannya di sepanjang trotoar, telah mengingkari kewajibannya sebagai pedagang. Hal tersebut berdampak pada terlanggarinya hak-hak orang lain, terutama pejalan kaki. Sebab, trotoar bukan tempat untuk berdagang, tetapi untuk melintas bagi pejalan kaki.

Jawaban: E

18. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan warga negara agar saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing merupakan salah satu peran warga negara dalam pemajuan dan penghormatan HAM.

Jawaban: A

19. Salah satu manfaat kehidupan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ialah terbanggunya komunikasi yang baik antarmasyarakat.

Jawaban: A

20. Dalam demokrasi, jika rakyat menentukan pemerintahan secara langsung, disebut demokrasi langsung. Jika rakyat tidak langsung menentukan pemerintahan, tetapi memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam pemerintahan disebut demokrasi perwakilan (tidak langsung).

Jawaban: B

21. Salah satu sikap demokratis yang harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari ialah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu mengutamakan kewajiban baru menuntut hak-hak kita. Itulah keseimbangan hak dan kewajiban.

Jawaban: C

22. Untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki aneka macam bahasa daerah, dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antarbudaya (antarsuku) yang berbeda bahasa daerahnnya.

Jawaban: C

23. Dengan semangat nasionalisme, yaitu semangat menjunjung tinggi bangsa dan negara, kita akan dapat mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Jawaban: A

24. Paham etnosentrisme adalah paham yang memandang bahwa etnisnya lah yang paling baik, sehingga menjadi ukuran dalam berinteraksi dengan etnis/suku lain. Hal ini berdampak pada interaksi sosial, sehingga menghambat integrasi nasional.

Jawaban: A

25. Salah satu peran masyarakat dalam menjaga keselarasan antarbudaya untuk mewujudkan persatuhan dan kesatuan, ialah dengan cara melestarikan

kebudayaan yang berkembang di daerah masing-masing, sehingga dapat memperkuuh kebudayaan nasional.

Jawaban: A

26. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi, sikap kita yang paling bijak ialah dengan menerima pengaruh yang baik dan membuang jauh-jauh pengaruh yang buruk. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan alat saring yang benar, yakni nilai-nilai Pancasila.

Jawaban: C

27. Guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian? Sebab, salah satu kepentingan rakyat yang paling penting dan mendesak adalah kesejahteraan hidup.

Jawaban: E

28. Kemiskinan terjadi akibat tidak tercapainya salah satu tujuan nasional, yakni menyejahterakan rakyat. Orang miskin adalah orang-orang yang hidupnya tidak sejahtera.

Jawaban: B

29. Urutan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ialah sebagai berikut.

- (1) Pendaftaran dan penetapan calon pemilih.
- (2) Pendaftaran dan penetapan paslon.
- (3) Kampanye paslon.
- (4) Pemungutan suara.
- (5) Penghitungan suara.
- (6) Penetapan calon terpilih.

Jawaban: A

30. Menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Jawaban: A

31. Contoh peran pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial bagi rakyatnya ialah membangun atau menyediakan fasilitas umum di setiap pemukiman penduduk.

Jawaban: A

32. Yang mendasari bangsa Indonesia memilih bentuk pemerintahan republik konstitusional ialah karena konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Dengan republik konstitusional, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tetapi, perwujudannya harus sesuai dengan konstitusi, sehingga tidak melahirkan tindakan sewenang-wenang dan anarkistik.

Jawaban: E

33. Memperkuat kekuasaan di daerah bukan tugas pemerintah daerah dalam otonomi daerah.

Jawaban: E

34. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik."

Jawaban · A

35. Ciri-ciri NKRI di antaranya sebagai berikut.

 - Hanya memiliki satu UUD, kepala negara, dan dewan menteri.
 - Kedaulatan ke dalam dan ke luar dimiliki oleh pemerintah pusat.
 - Kebijakan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan dikendalikan pemerintah pusat.

Jawaban: B

36. Negara RIS tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Jawaban: B

37. Pemerintahan yang terbuka (transparan) ditandai dengan adanya keterbukaan dan aliran informasi secara vertikal dari pemerintah kepada rakyat, sehingga aktivitas pemerintahan diketahui oleh rakyatnya.

Jawaban B

B. Uraian

41. Sumber hukum formal di Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

 - Undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dengan persetujuan Presiden.
 - Konvensi, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan merupakan suatu konsensus.
 - Yurisprudensi,yaitu keputusan hakim atas suatu perkara yang tidak diatur dalam UU dan peraturan lainnya, tetapi harus diputuskan oleh hakim dengan seadil-adilnya.
 - Doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara.
 - Traktat, yaitu perjanjian yang dibuat antarpihak dan mengikat bagi pihak-pihak yang berjanji atau bahkan pihak lain yang tidak berjanji.

42. Empat wewenang dan tugas pokok Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

 - Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
 - Memutus pembubaran partai politik.
 - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

43. Cara memupuk persatuan dan kesatuan bangsa secara ideologi, dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut.

 - Memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila.
 - Menolak ideologi asing yang merusak ideologi nasional, seperti liberalisme, komunisme, dan sosialisme.
 - Menolak paham-paham ekstrem.

44. Empat kewajiban warga negara menurut UUD NRI Tahun 1945, di antaranya sebagai berikut.

 - Menjunjung hukum dan pemerintahan.
 - Membela negara.
 - Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
 - Mewujudkan sikap toleran dalam beragama.

45. Urutan perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut.

 - Duta besar.
 - Duta.
 - Menteri residen.
 - Kuasa usaha.
 - Atase-atase.

38. Untuk menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, setiap warga negara hendaknya mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama. Selain itu, juga mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan satu sama lain dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Jawaban: E

39. Mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan bersama tidak mencerminkan sikap demokratis. Justru dalam sikap demokratis, kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Jawaban: E

40. Untuk membangun sistem ekonomi yang kuat, maka setiap warga negara hendaknya menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Hal tersebut dapat membuat keuntungan berputar di dalam negeri. Ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Jawaban: C

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN SOAL PEMAHAMAN KURIKULUM 2013 (PAKET 2)

PPKn

A. Pilihan Ganda

1. Pokok pikiran pertama adalah pokok pikiran persatuan. Negara melindungi segenap bangsa dan tanah air.

Jawaban: A

2. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ialah keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan dengan melawan segala bentuk penjajahan. Hal ini tergambar dalam pernyataan "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Jawaban: C

3. Negara Indonesia adalah negara yang melindungi serta meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Hal ini merupakan uraian dari pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu pokok pikiran persatuan.

Jawaban: B

4. Sebagai sumber nilai, Pancasila menjadi rujukan dan pedoman hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila menjadi moralitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Jawaban: C

5. Suka memberi pertolongan, bersikap adil, dan tidak melakukan pemerasan termasuk pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila kelima.

Jawaban: E

6. a. Mengutamakan kepentingan negara.
b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
c. Mengutamakan musyawarah.

Ketiga sikap tersebut merupakan perwujudan sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Jawaban: D

7. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, diantaranya sebagai berikut.

- a. Mengkaji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

- b. Memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Jawaban: D

8. Hukum publik adalah pembagian hukum menurut isinya. Menurut isinya, hukum dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu hukum publik dan hukum privat. Menurut sumbernya, hukum terdiri atas: undang-undang, konvensi (kebiasaan), traktat, yurisprudensi, dan doktrin.

Jawaban: C

9. Peraturan Pemerintah adalah perundangan yang dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang.

Jawaban: B

10. Salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menegakkan HAM ialah membentuk Komnas dan Pengadilan HAM.

Jawaban: A

11. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi.

Jawaban: B

12. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, masih sering terjadi konflik yang disebabkan oleh persoalan yang ringan. Hal tersebut dapat menyebabkan sulitnya penegakan HAM di Indonesia dilihat dari faktor sosial budaya. Selain itu, masih adanya adat istiadat atau budaya lokal yang bertentangan dengan HAM juga merupakan salah satu hal yang membuat terhambatnya penegakan HAM di Indonesia.

Jawaban: A

13. Pentingnya kerja sama internasional, ialah terjaminnya kesejahteraan para warganya masing-masing.

Jawaban: E

14. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional sangatlah penting sepanjang mendukung terwujudnya tujuan nasional seperti yang tersurat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Jawaban: E

15. Tujuan utama didirikannya ASEAN ialah kerja sama dalam bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi.

Jawaban: C

16. Menyokong atau mendukung uji coba nuklir di dalam laut bukan termasuk bagian dari tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif.

Jawaban: D

17. Sulitnya memindahkan pedagang kaki lima ke tempat yang lebih layak untuk berjualan antara lain karena masih rendahnya kesadaran hukum para pedagang kaki lima. Mereka belum menyadari bahwa apa yang dilakukannya melanggar hak asasi orang lain.

Jawaban: A

18. Membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu wujud mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak orang lain. Dengan membuang sampah pada tempat yang sesuai berarti kita menjaga lingkungan hidup kita yang merupakan kebutuhan semua orang.

Jawaban: A

19. Memilih dalam pemilihan kepala daerah termasuk hak asasi manusia dalam bidang politik (political rights).

Jawaban: C

20. Menghendaki persamaan pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hal yang tidak mungkin.

Jawaban: E

21. Guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian? Sebab, salah satu kepentingan rakyat yang paling penting dan mendesak adalah kesejahteraan hidup.

Jawaban: E

22. Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia".

Jawaban: C

23. Persatuan dan kesatuan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini karena dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kukuh dan kuat.

Jawaban: E

24. Nasionalisme bukanlah ancaman terhadap integrasi nasional. Justru, nasionalisme merupakan faktor pendorong integrasi nasional.

Jawaban: C

25. Persatuan yang baik adalah persatuan untuk semua orang tanpa kecuali, bukan pula untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Jawaban: E

26. Dengan semangat nasionalisme kita dapat mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Jawaban: A

27. Tingkat kebebasan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara merupakan prinsip demokrasi universal. Adapun prinsip-prinsip lainnya adalah sebagai berikut.

- Keseimbangan hak dan kewajiban.
- Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
- Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
- Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jawaban: D

28. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah Presiden.

Jawaban: A

29. Contoh peran pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial bagi rakyatnya ialah membangun atau menyediakan fasilitas umum di setiap pemukiman penduduk.

Jawaban: A

30. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."

Jawaban: D

31. Alasan yang mendasari bangsa Indonesia memilih bentuk pemerintahan republik konstitusional ialah karena konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Dengan republik konstitusional, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Tetapi, perwujudannya harus sesuai dengan konstitusi, sehingga tidak melahirkan tindakan sewenang-wenang.

Jawaban: E

32. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, bupati bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. Sementara itu, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri.

Jawaban: B

33. Salah satu bidang yang menjadi wewenang pemerintah daerah ialah penyelenggaraan pendidikan. Adapun masalah politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan dan keamanan, serta yustisi adalah menjadi urusan pemerintah pusat.

Jawaban: C

34. Program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan salah satu program pemerintah yang selaras dengan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum.

Jawaban: A

35. Pemerintahan yang terbuka (transparan) ditandai adanya keterbukaan dan aliran informasi secara vertikal dari pemerintah kepada rakyat, sehingga aktivitas pemerintahan diketahui oleh rakyatnya.

Jawaban: B

36. Bentuk pemerintahan Indonesia tidak pernah berubah sejak kemerdekaan, yakni republik (res = persetujuan; publika = rakyat).

Jawaban: C

37. Ciri-ciri sistem pemerintahan kabinet Presidensial antara lain:
- penyelenggaraan negara berada di tangan presiden;
 - kabinet dibentuk oleh presiden;
 - presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen;
 - presiden tidak bisa membubarkan parlemen.

Jawaban: D

38. Nilai instrumental jaminan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29.

Jawaban: A

39. Musyawarah merupakan salah satu kegiatan yang mengandung nilai praksis, yaitu nilai pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

Jawaban: B

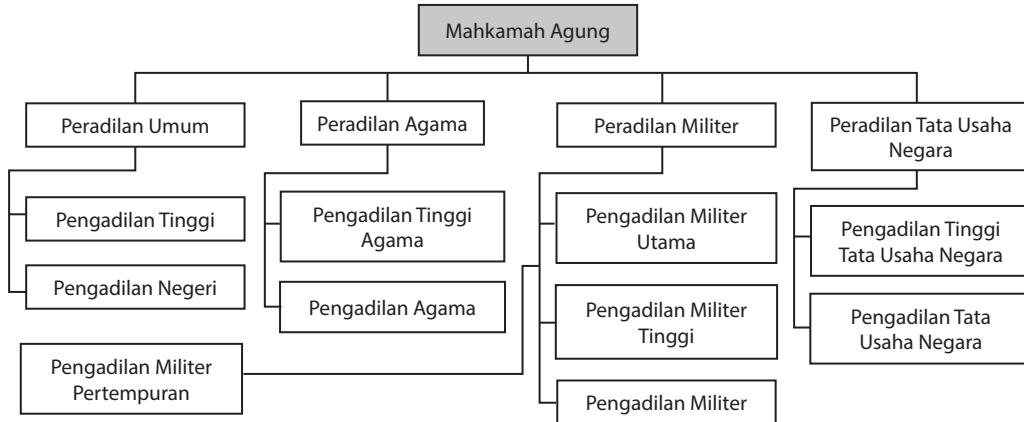
40. Nilai dasar Pancasila tidak bisa diubah karena telah menjadi konsensus nasional untuk tidak diubah. Yang dapat berubah adalah nilai instrumental dan nilai praksis Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan tanpa mengabaikan jati diri bangsa.

Jawaban: C

B. Uraian

41. Fungsi perwakilan diplomatik, di antaranya sebagai berikut.
- Fungsi representasi, yakni mewakili negara pengirim di negara penerima.
 - Fungsi negosiasi, yaitu melakukan perjanjian dengan negara penerima.
 - Fungsi proteksi, yaitu melindungi warga negara dan aset negara di negara penerima.
 - Fungsi observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap keadaan negara penerima yang dibenarkan secara hukum internasional dan melaporkannya kepada negara pengirim.
 - Fungsi relasi, yaitu menjalin hubungan persaudaraan/persahabatan dengan negara penerima.
42. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- Nilai ketuhanan: melaksanakan ibadah tepat pada waktunya.
 - Nilai kemanusiaan: tidak melakukan perbuatan diskriminatif.
 - Nilai persatuan: mencintai dan menggunakan produk buatan dalam negeri.
 - Nilai kerakyatan: mau menghargai pendapat orang lain.
 - Nilai keadilan: mau menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan.
43. Klasifikasi lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan kekuasaan yang dipegangnya adalah sebagai berikut.
- Lembaga legislatif: MPR, DPR, dan DPRD.
 - Lembaga eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden.
 - Lembaga yudikatif: MA, MK, dan KY.
 - Lembaga eksaminatif: BPK.

44. Tingkatan lembaga peradilan di Indonesia



45. Salah satu kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah kewajiban untuk membela negara. Hal tersebut diatur dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN SOAL PEMANTAPAN KURIKULUM 2013

A. Pilihan Ganda

1. Alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Pernyataan ini mengandung arti/makna:
 - menunjukkan sikap religius bangsa Indonesia;
 - penegasan pernyataan kemerdekaan RI;
 - kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia yang gigih, tetapi juga karena rahmat Tuhan YME.

Jawaban: E

2. Alinea kedua pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernyataan kemerdekaan pada alinea kedua pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan awal dari proses perjuangan bangsa menuju bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Jawaban: E

3. Melalui peringatan HUT Kemerdekaan RI dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, akan mendorong sikap bangsa kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang heterogen dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Jawaban: D

4. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila digunakan untuk mengatur pemerintahan negara agar tertata dengan baik serta dapat mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang adil dan makmur.

Jawaban: C

5. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat ialah dengan membangun sarana-sarana umum di berbagai pelosok negeri untuk pemerataan pembangunan.

Jawaban: D

6. Dalam sila keempat Pancasila, terkandung nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ini memiliki makna bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, dalam kehidupan bangsa Indonesia, segala pengambilan

keputusan menandakan kehidupan bangsa Indonesia dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

Jawaban: A

7. Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, karena dalam Pembukaan UUD NRI terdapat:
 - a. dasar negara Pancasila;
 - b. fungsi dan tujuan negara Indonesia;
 - c. bentuk negara Indonesia.

Jawaban: C

8. Peraturan yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas adalah Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya (UU No. 2 Tahun 2009).

Jawaban: A

9. Fungsi Peraturan Pemerintah (PP) ialah mengatur lebih lanjut peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, PP merupakan peraturan turunan dari UU untuk melaksanakan Undang-Undang.

Jawaban: D

10. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrati. Disebut kodrati karena HAM merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa.

Jawaban: E

11. Peran serta warga negara dalam memberantas korupsi merupakan peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara menaati hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jawaban: A

12. Berdasarkan faktor komunikasi dan informasi, beberapa hal yang menghambat penegakan HAM, di antaranya sebagai berikut.

- a. Keadaan geografis Indonesia yang sangat luas sehingga dapat membatasi komunikasi antar-daerah.
- b. Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi untuk seluruh wilayah Indonesia.
- c. Masih terbatasnya sistem informasi untuk melakukan sosialisasi.

Jawaban: C

13. Sesuai dengan kepanjangannya, APEC atau Asia Pasific Economic Community (Komunitas Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik) bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik.

Jawaban: A

14. Arah politik luar negeri bebas aktif Indonesia berorientasi dan menitikberatkan pada upaya dan strategi mencapai tujuan nasional.

Jawaban: E

15. Maju atau mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh usaha bangsa dan negara itu sendiri. Adapun pengaruh dari luar hanyalah pendukung dan pelengkap saja.

Jawaban: D

16. Beberapa peran Indonesia dalam PBB di antaranya sebagai berikut.

- Indonesia pernah ditunjuk sebagai pemimpin serta anggota tetap di beberapa organisasi PBB.
- Membantu penyelesaian konflik di berbagai negara.
- Melakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia.
- Memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara.

Jawaban: D

17. Yang bertugas menertibkan pedagang kaki lima di jalan-jalan (trotoar) ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Jawaban: E

18. Optimalisasi teknologi belum tentu dapat mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Jawaban: C

19. Dalam negara demokrasi, peran rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan langsung memilih perwakilannya dalam pemerintahan.

Jawaban: B

20. Pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer, lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik.

Jawaban: D

21. Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia seharusnya tidak membeda-bedakan perlakuan hukum kepada seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berikut ini, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya." Menurut pasal dan ayat ini, setiap warga negara harus diperlakukan secara sederajat di depan hukum.

Jawaban: D

22. Adanya keanekaragaman bahasa daerah di Indonesia tidak menjadi kendala dalam komunikasi dan menggalang integrasi bangsa. Sebab, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu Indonesia sebagai bahasa pengantar antarbudaya.

Jawaban: B

23. Dengan semangat nasionalisme, kita dapat mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila.

Jawaban: A

24. Munculnya peristiwa diskriminasi dengan tidak memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain dalam beribadah, terutama kepada pemeluk agama minoritas, terjadi karena berkembangnya paham intoleransi dalam masyarakat tersebut. Sikap intoleransi ini tidak dibenarkan dalam masyarakat Pancasila.

Jawaban: E

25. Untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, hendaknya kita tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Dengan sikap ini, persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat terbina dengan baik.

Jawaban: C

26. Salah satu dampak negatif globalisasi bagi bangsa Indonesia ialah penerapan budaya-budaya lokal Indonesia yang semakin luntur, namun perkembangan penggunaan budaya-budaya dari barat semakin banyak.

Jawaban: D

27. Guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian? Sebab, salah satu kepentingan rakyat yang paling penting adalah kesejahteraan hidup.

Jawaban: E

28. Salah satu penyebab kemiskinan berdasarkan data yang ada ialah karena tingginya tingkat pengangguran.

Jawaban: A

29. Salah satu larangan kampanye ialah menyenggung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Jawaban: E

30. Setelah UU No. 32 Tahun 2004 diberlakukan, gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Hal ini antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan legitimasi hukum gubernur/wagub terpilih.

Jawaban: B

31. Tujuan pemberian otonomi daerah di antaranya sebagai berikut.
- Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
 - Pengembangan kehidupan demokrasi.
 - Keadilan.
 - Pemerataan.
 - Pemerataan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antardaerah.
 - Mendorong pemberdayaan masyarakat.
 - Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah.
 - Meningkatkan peran serta masyarakat.
 - Mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Jawaban: B

32. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD NRI Tahun 1945 harus selalu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk menyempurnakannya.

Jawaban: E

33. Membangun rumah sakit daerah untuk kepentingan masyarakat merupakan salah satu peran pemerintah daerah yang mendukung pencapaian tujuan nasional, yakni menjehaterakan rakyat.

Jawaban: C

34. Maksud dari pernyataan "Negara Indonesia ialah negara hukum" sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Jawaban: E

B. Uraian

41. Trias politika adalah teori yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif adalah kekuasaan yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.
42. Dalam konstitusi, terkandung tiga nilai, di antaranya sebagai berikut.
- Nilai normatif, artinya suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuensi.

35. Ciri negara kesatuan, di antaranya ialah hanya terdiri atas satu negara, satu pemerintahan, dan satu Undang-Undang Dasar untuk seluruh wilayah negara.

Jawaban: E

36. Pembentukan Negara Indonesia Serikat (NIS) merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk melemahkan Indonesia sehingga Indonesia dapat dan mudah dipecah-belah. Namun, jika negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegakkan, bangsa kita akan sulit dipecah-belah. Oleh sebab itu, NKRI adalah harga mati yang harus dipertahankan sepanjang masa.

Jawaban: C

37. Pemerintahan yang terbuka (tranparan) adalah pemerintahan yang memiliki aliran informasi secara vertikal dari pemerintah kepada rakyatnya.

Jawaban: B

38. Untuk menciptakan kerukunan hidup dengan orang yang berbeda keyakinan dan agama, kita harus mengembangkan sikap toleran, yaitu membiarkan orang lain memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya itu. Tidak boleh saling mengganggu, apalagi saling memaksakan kehendak. Kita harus saling menghormati keyakinan dan peribadatan orang lain.

Jawaban: C

39. Pada kurun waktu 1966 – 1998, Presiden adalah mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.

Jawaban: A

40. Pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.

Jawaban: A

- b. Nilai nominal, artinya suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.
 - c. Nilai semantik, artinya suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.
43. Hak warga negara yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 di antaranya sebagai berikut.
- | No. | Hak Warga Negara | Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 |
|-----|---|--|
| 1. | Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. | Pasal 27 ayat (2) |
| 2. | Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. | Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) |
| 3. | Hak untuk mengemukakan pendapat. | Pasal 28 |
| 4. | Hak untuk hidup. | Pasal 28A |
| 5. | Hak untuk mendapatkan pendidikan. | Pasal 31 ayat (1) |
44. Jika seorang terdakwa tidak dapat menerima putusan dari pengadilan negeri, ia dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi.
45. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.

KUNCI JAWABAN

PREDIKSI USBN Tahun 2018/2019

PPKn

A. Pilihan Ganda

- | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 9. A | 17. E | 25. C | 33. D |
| 2. D | 10. B | 18. D | 26. A | 34. E |
| 3. C | 11. E | 19. D | 27. B | 35. D |
| 4. E | 12. B | 20. A | 28. D | 36. E |
| 5. E | 13. A | 21. A | 29. B | 37. B |
| 6. C | 14. B | 22. A | 30. E | 38. D |
| 7. E | 15. A | 23. C | 31. A | 39. C |
| 8. B | 16. D | 24. B | 32. C | 40. D |

B. Uraian

41. Ilustrasi kasus pada soal merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik pelanggaran terhadap diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selain itu, tindakan seseorang pada ilustrasi tersebut menunjukkan suatu pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa kita wajib menjunjung hukum. Salah satu perwujudan menjunjung hukum adalah dengan mematuhi setiap peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan mengendarai motor di trotoar merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

(Jawaban dapat disesuaikan dengan analisis siswa, asalkan masih relevan)

42. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika dipilih sebagai semboyan negara karena kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman bangsa Indonesia bukan sebagai faktor pemecah bangsa Indonesia. Tetapi sebaliknya, kemajemukan bangsa yang beranekaragam

dapat dipersatukan demi terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa.

(Jawaban dapat disesuaikan dengan analisis dan pendapat siswa, asalkan masih relevan)

43. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan ASEAN, di antaranya sebagai berikut.

- Pada tahun 1987, Indonesia menjadi penengah saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam yang pada tahun 1991, dalam Konferensi Paris, kedua negara tersebut menyelehati perjanjian damai.
- Indonesia menjadi penengah antara Moro National Front Liberation (MNFL) dengan pemerintah Filipina, yang pada akhirnya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk melakukan perjanjian damai yang dilakukan pada pertemuan di Indonesia.

(Jawaban dapat disesuaikan dengan analisis siswa, asalkan masih relevan)

44. Hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

Hak	a. Mendapatkan pendidikan. b. Mendapatkan biaya pendidikan dasar dari pemerintah.
Kewajiban	Mengikuti pendidikan dasar.

45. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.